

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA BADAN USAHA
MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DESA DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Fidya Nurdasana Putri
NPM : 177310194**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan juga atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menyelesaikan skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karna telah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti di sekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk karya ini, maka saya persembahkan untuk Ayahanda tercinta **Dasriono** dan Ibunda tersayang **Nursam**, serta Abang yang saya sayangi **Farid Arista Marzuk**,

SH dan Adik yang saya sayangi **Fazilla Jannah Purwati**. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan air mata kalian. Terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karya skripsi ini saya persembahkan untuk kalian sebagai wujud rasa kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita ini akan menjadi persembahan yang mulia untuk Ayah, Ibu dan Abang dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Untuk bapak **Dr. Zainal, S.Sos., M.Si** selaku dosen pembimbing saya yang baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya yang dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, nasehat dan ilmu yang di berikan semoga menjadi amalan dan pahala yang terus mengalir kedepannya.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk teman-teman saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih untuk memori yang kita rajut bersama setiap harinya, atas tawayNg setiap hari kita miliki dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah 3 tahun 6 bulan ini menjadi lebih berarti dan semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang lebih indah.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Manajemen Pemerintahan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar“** .

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terkhusus Orang Tua Penulis yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis.
7. Farid Arista Marzuk selaku abang dan Fazila Jannah Purwati selaku adik saya ucapkan terima kasih karna telah memberikan semangat yang luar biasa kepada Penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Teman saya Elsa Ade Lina, Yolanda Fransiska, Sherly Marlina, Annisa Rahma Dinda Zalva, Vivin Permata sari yang membantu saya, mencari dosen pembimbing dan menemani saya selama pembuatan usulan penelitian ini, saya mengucapkan banyak terima kasih.
9. Orang yang selalu menyemangati saya dan selalu menemani saya sampai di titik ini yaitu Minda Anugrah, saya mengucapkan terima kasih banyak.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

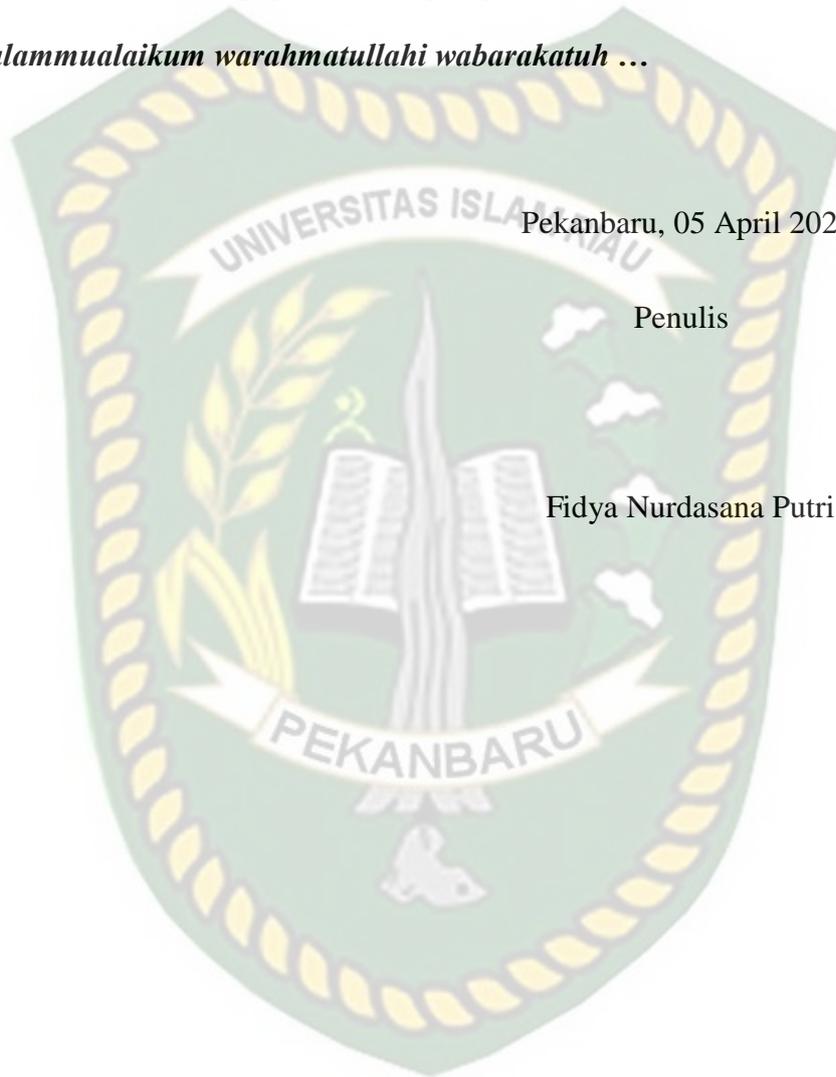
Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 05 April 2021

Penulis

Fidya Nurdasana Putri



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II	14
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	20
3. Konsep Organisasi Pemerintahan.....	26
4. Konsep BUMDes.....	30
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel	39
BAB III	42

METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i>	43
D. Teknik Penarikan <i>Informan</i>	45
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Jenis Dan Sumber Data	46
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data.....	48
I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49
BAB IV	51
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Secara Umum Desa Koto Mesjid	51
1. Sejarah Singkat Desa Koto Mesjid.....	51
2. Visi Misi Desa Koto Mesjid	52
3. Luas dan Batas Wilayah Desa Koto Mesjid	53
4. Keadaan Penduduk Desa Koto Mesjid	55
5. Perekonomian Desa Koto Mesjid.....	55
6. Pemerintahan Desa Koto Mesjid	57
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin	57
1. Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin.....	57
2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin	58
3. Struktur Organisasi BUMDes Kampung Patin.....	60
4. Peran Stuktur Organisasi BUMDes Kampung Patin.....	61
BAB V.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Identitas <i>Informan</i>	65
B. Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.	70
C. Hambatan Dalam Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.	98

BAB VI	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1: Kerangka Pikir Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	37
IV.1: Peta Wilayah Desa Koto Mesjid.....	54
IV.2: Struktur Organisasi BUMDes Kampung Patin Penelian Penulis Tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Penyertaan Modal BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	9
I.2 : Penambahan PADes di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	9
I.3 : Unit Usaha BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	10
II.1: Penelitian Terdahulu Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	34
II.2: Operasional Variabel Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	39
III.1: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49
IV.1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdusun Desa Koto Mesjid Tahun 2019.....	55
IV.2: Identifikasi Sektor Perikanan.....	56
IV.3: Identifikasi Sektor Perkebunan.....	56
IV.4: Identifikasi Sektor Perternakan.....	56
IV.5: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Koto Mesjid.....	57
V.1: Nama <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian Penulis Tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....	66
V.2: Usia <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian Penulis tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan	

Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....67

V.3: Jenis Kelamin *Key Informan* dan *Informan* Penelitian Penulis tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....68

V.4: Tingkat Pendidikan *Key Informan* dan *Informan* Penelitian Penulis tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.....69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Wawancara Penelitian.....	112
2. Dokumentasi Penelitian.....	121



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Fidyas Nurdasana Putri
NPM : 177310194
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 April 2021

Ditanda-tangani dan
Ditandatangani


Fidyas Nurdasana Putri

MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh:

Fidya Nurdasana Putri

Tingginya tingkat penunggakan hutang unit usaha Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menjadi suatu permasalahan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar hutang Simpan Pinjam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun indikator penelitian Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerak, dan Pengawasan. Penelitian ini di lakukan di Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin. Teknik pengumpulan data yang di pakai yaitu wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan dokumen-dokumen kualitatif. Teknik Penarikan informan di lakukan dengan menggunakan Teknik penarikan snow ball yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk menggantinya dengan informan lain apabila jawaban yang di berikan masih simpang siur. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar belum berjalan dengan semestinya, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, seperti di bekukannya unit usaha Simpan Pinjam dan di alihkan ke peminjaman pakan ikan oleh BUMDes Kampung Patin untuk membantu usaha masyarakat, namun dengan wujud pemberian bantuan oleh BUMDes Kampung Patin masih belum tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang memerlukan unit usaha Simpan Pinjam di aktifkan kembali untuk bantuan modal usaha sehingga perlu adanya koordinasi Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Kampung Patin untuk melakukan pelatihan tentang unit usaha Simpan Pinjam yang selalu menjadi permasalahan penunggakan pembayaran hutang.

Kata Kunci: *Manajemen, Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa.*

**GOVERNMENT MANAGEMENT IN BUSINESS ENTITIES OWN THE
VILLAGE IN INCREASING THE ORIGINAL INCOME OF THE VILLAGE
IN THE VILLAGE KOTO MESJID DISTRICT XIII KOTO KAMPAR
KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

By:

Fidya Nurdasana Putri

The high level of debt arrears of the Savings and Loans business unit at the Village Owned Enterprise in Kampung Patin Village in Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency is a problem of the lack of awareness of the community to pay Savings and Loan debts. The purpose of this study was to determine government management in Village-Owned Enterprises in increasing Village Original Income in Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency. This study used qualitative research methods. The research indicators are Planning, Organizing, Driving, and Supervision. This research was conducted at the Village-Owned Enterprise of Kampung Patin. The data collection techniques used were qualitative interviews, qualitative observations, and qualitative documents. The technique of withdrawing informants is done by using the snow ball drawing technique, namely the determination of several people as informants and it is possible to replace them with other informants if the answers given are still confusing. Based on the results of the research, it can be concluded that the Government Management at Village-Owned Enterprises in increasing Village Original Income in Koto Mesjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency has not been running properly, this is caused by several factors, such as the freezing of the Savings and Loans business unit and Diverted to lending fish feed by BUMDes Kampung Patin to help community businesses, but with the form of assistance provided by BUMDes Kampung Patin is still not on target because there are still many people who need Savings and Loans business units to be reactivated for business capital assistance so there is a need for Government coordination Village and Village Patin Village BUMDes Management to conduct training on Savings and Loans business units which always cause delinquency in debt payments.

Keywords: Management, Village Owned Enterprises, Village Native Income.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menurut Widjaja (2003) dalam (Amanda, 2015) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Widjaja (2003) dalam (Amanda, 2015) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai wadah usaha desa, dengan semangat kemandirian, kebersamaan dan kegotong-royongan antara Pemerintah Desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan

kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat (Sutoro, 2014;248) dalam (Seimbiring, 2017).

Melihat latar belakang diundangkannya Undang-Undang tentang Desa terlihat, bahwa keberadaan Desa atau tepatnya Pemerintah Desa semakin penting keberadaannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 10 UU No.6/2014 dikemukakan: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun

2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012) dalam (Prasetyo, 2016).

Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Secara konseptual bagi Pemerintah Desa jika BUMDes dapat dikelola secara baik, Pendapatan Asli Desa (PADesa) akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pendapatan desa, maka pembangunan desa pun dapat dilakukan dalam berbagai sektor. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah, untuk melakukan pengelolaan BUMDes agar mampu menghasilkan keuntungan, membutuhkan pengelolaan secara profesional. Disebut demikian, sebab BUMDes mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan

badan usaha lainnya. Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa BUMDes bukan hanya bisnis ekonomi semata, tetapi juga mengandung bisnis sosial. Selain berkaitan dengan hal ini, bagi Desa yang hendak mendirikan Badan Usaha Desa perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana bentuk unit usaha yang akan bernaung dibawah Badan Usaha Milik Desa (Sutoro, 2014;264) dalam (Seimbiring, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul.

Keberhasilan serta berkembangnya BUMDes dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terletak di pundak para pengurus BUMDes, meskipun bentuk BUMDes terkesan lebih sederhana dibandingkan dengan badan usaha lain, tetapi pelaksanaan program BUMDes tidaklah sederhana karena dalam implementasi program yang ada, para pengurus BUMDes harus benar-benar memahami keadaan serta potensi desa setempat dan harus selalu berinovasi untuk menghadapi setiap perubahan yang ada, dengan tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan dari pengelolaan

BUMDes tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti sumber daya manusia, finansial, standard oprasional prosedur (SOP) dan lain–lain.

Untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes perlu diberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dari pemerintah desa, sehingga pelaksanaan operasional BUMDes dapat berjalan lebih baik termasuk didalamnya adalah penataan manajemen yang lebih baik, tertib administrasi, sistejm pelaporan keuangan, jam kerja dan penataan asset, sehingga kinerja pengelola BUMDes dapat meningkat dan BUMDes mampu berkembang lebih baik yang selanjutnya mampu menambah jenis usaha yang dikelola. Agar kinerja pengelola BUMDes dapat meningkat, perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendidikan karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan BUMDes.

Keberadaan BUMDes merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan, hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya

ekonominya yang ada pada masing-masing desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik. Pembentukan Undang-Undang sudah lebih dari 5 tahun lamanya, tentu saja anggaran sudah banyak sekali yang terrealisasi khususnya anggaran BUMDes, untuk dikelola demi pengembangan ekonomi masyarakat yang akan berimbas pada meningkatnya pendapatan Desa itu sendiri.

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-

undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014) dalam (Gufran dan Hajirin, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Secara sederhana BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang bertugas mengelola kekayaan yang berkaitan dengan aset desa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa BUMDes dapat meminta pinjaman kepada pihak lain apabila mengalami kesulitan modal usaha hal ini di ungkapkan oleh (Kurnia 2015) dalam (Gufran dan Hajirin, 2019).

Menurut Kurnia (2015) dalam (Gufran dan Hajirin, 2019) BUMDes yaitu lembaga ekonomi yang mengatur asas kemandirian dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dikaji Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar usaha masyarakat di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai

wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan memperhatikan beberapa hal, maka Desa Koto Mesjid pada tanggal 16 Maret 2015 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes dan diberinama “Kampung Patin”. Dengan didirikannya BUMDes Kampung Patin tersebut diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset Desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Koto Mesjid, karena bukan lagi program “*topdown*” atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, Melainkan pembangunan Desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Tabel 1.2 Penyertaan Modal BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Penyertaan Modal	Tahun	Jumlah
Dari Pemerintah Desa	2016	Rp. 87.600.000,-
Dari Pemerintah Desa	2017	Rp. 62.687.000,-
Dari Pemerintah Desa	2018	Rp. 30.258.000,-
BANKEU dari Povinsi	2019	Rp. 158.000.000,-
Dari Pemerintah Desa	2020	Rp. 64.250.000,-

Sumber: Data BUMDes Tahun 2019

BUMDes Kampung patin didirikan dengan memperhatikan potensi desa yang dimiliki, Desa Koto Mesjid terdiri dari 4 Dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga Budidaya Ikan air tawar.

Tabel 1.2 Penambahan PADes di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Desa
2016	Rp. 4.046.000,-
2017	Rp. 1.390.000,-
2018	Rp. 18.900.000,-
2019	Rp. 11.000.000,-
2020	Rp. 21.600.000,-

Sumber: Data BUMDes Tahun 2019

Pembentukan unit-unit usaha BUMDes Kampung Patin didasarkan potensi yang dimiliki Desa. Unit-unit tersebut dijabarkan dalam kegiatan sistem kerja BUMDes Kampung Patin, sebagai berikut:

Table 1.3 Unit Usaha BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Nama Unit Usaha	Produk/Kegiatan Yang Dilaksanakan atau Yang Dihasilkan
Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan Pakan Buatan b. Budidaya Perikanan Patin c. Ikan Asap Patin d. Ikan Patin Segar
Pasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur Kelancaran Semua Kegiatan Pasar dan Perbaikan Sarana Prasarana b. Mengontrol dan Mengelola Keuangan Pasar
Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Agen BRILINK
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Odong-odong b. Wisata Alam yaitu Sungai Gagak dan Bukit Kompe
Rumah Pakan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyewaan Mesin Pakan

Sumber: Data BUMDes Tahun 2019

Berdasarkan jenis usaha diatas hal yang di fokuskan untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa adalah ke unit usaha perikanan, karena rata-rata mata pencaharian penduduk di Desa Koto Mesjid adalah budidaya ikan air tawar.

Dari penjelasan di atas dan didukung dengan data penelitian maka fenomena peneliti amati antara lain:

1. Tingginya tingkat penunggakan hutang di BUMDes Kampung Patin.

Disini terlihat dari ekonomi masyarakat yang mata pencaharian di desa

tersebut yaitu sebagai petani karet dan budidaya ikan air tawar, jika harga karet turun maka petani tersebut tidak bisa membayar hutangnya tersebut, karna hasil dari karet yang dikumpulkan dalam satu minggu hanya cukup untuk makan saja. Dan jika yang membudidayakan ikan air tawar panen dan tidak mencapai target maka imbasnya juga tidak membayar hutangnya di BUMDes.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pinjaman yang telah diberikan BUMDes, dilihat dari hutang yang bertahun-tahun tidak dibayar oleh masyarakat.
3. Kurangnya ketegasan dari pihak BUMDes terkait masyarakat yang tidak membayar kredit pinjaman yang telah diberikan tersebut, dilihat dari tidak ditariknya jaminan oleh BUMDes tersebut, karena masih ada rasa kasihan atau ada saling keterkaitan seperti hubungan keluarga dengan pihak BUMdes.
4. Kurangnya pengawasan dari Komisaris BUMDes terhadap jalannya proses penarikan kredit tersebut, dilihat dari data nasabah yang penulis temukan pada tahun 2019, yaitu yang tidak membayar sebanyak 57 kreditur Rp. 258.319.430,-
5. Kurangnya BUMDes dalam meningkatkan PADes, terlihat dari data penambahan PADes pertahunnya.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut

dengan mengangkat judul penelitian **“Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam memahami manajemen pemerintahan pada BUMDesa yang menjadi teori utama untuk membahas penelitian ini.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan ini diharapkan memberi manfaat bagi instansi terkait dan masukan bagi BUMDes Kampung Patin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

c. Secara Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi Mahasiswa Universitas Islam Riau terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan yang melakukan kajian penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang memiliki ketaatan (Syafiie, 2018;20).

Apabila dalam suatu kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Syafiie, 2018;20).

Istilah pemerintah menurut Finer (dalam Labolo, 2014;17-18) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu:

1. Pemerintah menunjukkan pada satu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam

2. bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah.
3. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada.
4. Pemerintah menunjukkan secara langsung *person* (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
5. Pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni stuktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan di perintah.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan Negara sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ndaha (Ndraha, 2015;7) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

Syafiie (Syafiie, 2001;21) dalam (Karniawati, 2015) mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan

pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam ber bagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah fungsi, hubungan hubungan pemerintahan.

Secara gamblang Ndraha (Ndraha, 2003) dalam (Karniawati, 2015) mengemukakan ontologi Ilmu Pemerintahan menggunakan kontruksi pemikiran berdasarkan meta disiplin (basic flatform), sehingga common flatform dari berbagai disiplin ilmu itu ditemukan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (hubungan pemerintahan). Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu dinas dalam menjalankan fungsinya dan bagaimana mempelajari hubungan dinas sebagai penyelenggara Pemerintahan baik hubungan dengan sesama dinas maupun dengan masyarakatnya.

Van Ylst (Van Ylst, 2008;6) dalam (Karniawati, 2015) mengemukakan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.

- a. Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

Ndraha (Ndraha, 2003) dalam (Karniawati, 2015) juga menjelaskan bahwa epistemologi Ilmu Pemerintahan itu mengembangkan konsep hubungan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan monodisiplin (concept analyses and construction), multidisiplin (memandang suatu konsep/ masalah dari berbagai aspek).

Van Ylst (Van Ylst, 2008;165-168) dalam (Karniawati, 2015) mengemukakan pengkajian secara epistemologi terhadap Ilmu Pemerintahan adalah upaya yang perlu dilakukan dengan seksama dan kritik untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang keberadaan ilmu pengetahuan tersebut. Keberadaan Ilmu Pemerintahan yang tidak jelas ruang-lingkup dan objeknya, telah berlangsung lama jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, misalnya ilmu politik. Ada keraguan terhadap eksistensi Ilmu Pemerintahan sehingga banyak yang beranggapan bahwa Ilmu Pemerintahan tidak memiliki kompetensi yang jelas. Ilmu Pemerintahan dianggap kurang berperan dan tidak signifikan jika dibandingkan dengan ilmu politik, khususnya peran kontribusi ilmunya terhadap kegiatan pemerintahan.

Ndraha (Ndraha, 2003) dalam (Karniawati, 2015) mengemukakan fungsi Ilmu Pemerintahan dengan melihat fungsi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Kerlinger. Ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai dua fungsi, ke luar dan ke dalam. Ke luar, suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antargejala, menguji pengetahuan lain dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Ke dalam, ia berfungsi sebagai alat untuk menguji dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan bersifat heuristic, artinya menemukan, menguji, mengoreksi dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga terus-menerus mampu berfungsi. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka ilmu yang bersangkutan masih lemah (tidak didukung oleh cukup fakta yang konsisiten dan relevan) atau ketinggalan jaman (tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi atau mengantisipasi keadaan, karena zaman sudah berubah) atau tidak appropriate (andaikata ilmu diibaratkan alat, maka busi mati tidak bisa dengan kunci Inggris).

Ilmu Pemerintahan (yang merupakan ilmu pengetahuan) memiliki guna teoritis dan guna praktis. Guna teoritis dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/ mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/ mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat di peroleh pokok pemahaman tentang ilmu pemerintahan di antaranya yaitu:

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mengkaji permasalahan-permasalahan dalam organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik.
2. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari prosedur, struktur dan serangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan fungsi dan tugas suatu lembaga untuk mencapai tujuan negara.
3. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang di dasarkan pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat dan oleh sebab itu ilmu pemerintahan mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan menurut Ndraha (Ndraha, 2003) dalam (Karniawati, 2015) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan akan jasa publik dan pelayanan sipil. Sedangkan pemerintah adalah yang memiliki wewenang mengelola pelayanan publik dan pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah. Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu:

1. Fungsi pembangunan
2. Fungsi pemberdayaan

3. Fungsi pelayanan

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi, pemerintah tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan benar atau wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin moderen dengan di tandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian menjadi pelayan masyarakat. Pemerintahan moderen berarti pemerintahan yang tidak hanya melayani diri sendiri tetapi pemerintahan yang untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat dapat mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya dalam mencapai kemajuan bersama (2000:13). Pemerintahan yang demokratis lahir sebagai pelayan masyarakat dan karena itu pemerintahan selalu mencari cara untuk menyenangkan warganya.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk bekerja sama dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, termasuk keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dalam bekerja sama inilah manusia membutuhkan suatu wadah tertentu tempat manusia bekerja sama. Manusia bersatu dalam suatu tatanan bermasyarakat yang biasa dikenal dengan istilah “Negara”.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam menjalankan Negara, Salam mengemukakan:

“Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosaan bersama diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi biasanya dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah pemerintahan.” (Salam, 2007;34) dalam (Suharyadi dan Mohamad Aji Insani, 2016).

Kemudian tidak jauh berbeda dengan makna dari pengertian pemerintah di atas, Salam mendefinisikan pemerintah sebagai berikut:

“Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.” (Salam, 2007;34) dalam (Suharyadi dan Mohamad Aji Insani, 2016)

Sedangkan menurut Ndraha, pengertian pemerintah adalah:

“Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperinta. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya.” (Ndraha, 2015;6).

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang

berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2015;159).

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

Dalam unit usaha perikanan hal yang harus direncanakan terlebih dahulu adalah menetapkan jumlah kolam ikan yang akan dijadikan tempat budidaya ikan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing mencakup:

- (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok,
- (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan
- (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

Dalam peorganisasian ini hal yang harus dilakukan oleh pelaku budidaya yaitu melakukan kerja pemberian kapur pada kolam yang akan dijadikan untuk budidaya iakan air tawar, guna pemberian kapur ini adalah untuk membunuh hama di dalam kolam, supaya tidak dimakanny bibit ikan yang akan dimasukkan kedalam kolam tersebut.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Dalam fungsi penggerak ini hal yang mungkin dilakukan adalah pemberian pakan kepada ikan yang ndi budidaya, pakan tersebut adalah pakan yang di buat oleh karyawan BUMDes.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatankegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpanganpenyimpangan yang tidak diinginkan

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik (Terry, 2013;17-18) dalam (Suharyadi dan Insani,2016).

Dalam fungsi kontroling hal yang dilakukan adalah mengontrol jalanya unit usaha, mulai dari pemberian makan pada ikan, pemberian obat pada ikan jika terdapat ikan sakit, serta melakukan pengawasan terhadap hasil penjualan ikan baik itu ikan segar atau iikan asap.

Fungsi manajemen tersebut dapat di jadikan sebagai tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dari fungsi diatas, perencanaan adalah fungsi dasar manajemen. Manajemen pasti berangkat dari sebuah perencanaan karna fungsi-fungsi yang lain kan efektif dan efisien apabila terlebih dahulu direncanakan dengan baik.

Manajemen pemerintahan lebih di arahkan pada bagaimana secara organisasional mengimplementasikan kebijakan publik, dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknik, pengetahuan dan ketrampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ideide dan kebijakan program menjadi tindakan konkret.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan

publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan (Istianto, 2011;29) dalam (Suharyadi dan Mohamad Aji Insani, 2016).

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right things*”) secara *efficient* (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” (Ndraha, 2015;159). Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Ndraha (2015: 160), antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Konsep Organisasi Pemerintahan

Di Indonesia, istilah “lembaga” digunakan, baik dalam arti institusi, maupun dalam arti organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris *organization* (Latin, *organizare*, kemudian Inggris *organize*, berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian bagian yang berkaitan satu dengan yang lain). Jadi organisasi dapat dipandang sebagai produk kegiatan organizing (Ndraha, 2015; 235).

Menurut Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2008;6) dalam (Adawiyah, 2018).

Sedangkan Hasibuan berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2010;5) dalam (Adawiyah, 2018).

Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat beberapa hakikat organisasi, yaitu:

1. Organisasi merupakan sebuah sistem yang stabil atau baik dari segi hukum maupun sosial. Pada dasarnya sistem suatu organisasi didalamnya terdapat jaringan-jaringan hubungan yang diperpanjang sebagai sebuah system social.
2. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, artinya setiap orang dalam organisasi harus berpartisipasi. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan dari individu-individu yang didalamnya terdapat jaringan-jaringan hubungan yang dipandang sebagai suatu sistem yang saling melengkapi untuk mencapainya tujuan bersama.

Menurut Warren B. Brown da Dennis J. Moberg dalam *Organization Theory and Management: A Macro Approach* (1980, 234), sekurang-kurangnya ada lima hal yang menunjukkan pentingnya tujuan organisasional (organizational goals) (dalam Ndraha, 2015;238):

1. Tujuan oganisasional melegitimasi peranan organisasi di tengah-tengah lingkungan dan mendudukkannya pada posisi tertentu. Pada

gilirannya hal ini membantu pengurus untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungannya. Dalam kenyataannya, tujuan organisasional seringkali sebagai tuntutan lingkungan ketimbang sebagai nilai baru ciptaan pengurus organisasi.

2. Tujuan organisasi berfungsi sebagai daya Tarik guna mengundang atau memancing dukungan lingkungan dan perhatian masyarakat. Pada gilirannya hal ini memudahkan organisasi merekrut dan menggali sumber daya lingkungan. Dalam hubungan ini, tujuan organisasional yang sehat membangun citra organisasi di mata masyarakat dan citra masyarakat terhadap organisasi. Dalam hubungan itu, target berfungsi sebagai motif penting
3. Tujuan organisasional memberi arah kegiatan organisasi. Tujuan organisasional juga berfungsi sebagai norma, pegangan, tolok ukur, sehingga setiap penyimpangan sekecil apa pun, segera dapat terlihat dan dikoreksi. Lebih dari pada itu, tujuan organisasional merupakan factor integrative bagi seluruh komponen organisasi.
4. Berfungsi sebagai tolok ukur unjuk kerja (kinerja) organisasi, alat ukur buat control dan evaluasi kinerja organisasi. Melalui evaluasi tersebut dapat diidentifikasi tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.
5. Tujuan organisasional berfungsi sebagai kekuatan penggerak dan tantangan bagi organisasi. Bisa mendorong setiap orang untuk bekerja

sekeras-kerasnya dan berusaha sebisa-bisanya, sehingga produktivitas kerja setinggi-tingginya.

Jadi, tujuan organisasional lebih tinggi dari tujuan kelompok atau pribadi, juga lebih tinggi ketimbang pengurus atau penguasa organisasi. Harus dihormati dan ditaati oleh seluruh warga organisasi.

Agar dapat diukur (terukur), tujuan organisasional harus didedukasi atau dijabarkan, dari tujuan yang paling abstrak atau universal (*goals*) ke tujuan yang paling konkret (*incaran, anceran, effect, result, target*). Tujuan organisasi harus rasional, artinya harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan untung-rugi dan baik-buruk setiap alternatif tujuan pilihan, dan baik *input, through-put, output*, maupun *outcome*, harus distandarisasikan.

Organisasi baru dapat dibentuk jika terpenuhi tiga komponen dasar (Ndaraha, 2015;241), yaitu:

1. Visi dan misi (VM) organisasi yang jelas
2. Sumber-sumber minimal (awal, SS), baik SDA, SDM, maupun sumber SDB.
3. Dasar hukum (DH), misalnya kesepakatan para pendiri, keputusan pejabat yang berwenang (misalnya Akte Notaris), dan sebagainya.

Organisasi pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekayasa, dan mengubah lingkungan dengan kenggunaan kewenangan, kekuatan, paksaan, dan kekerasan yang sah. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan bisa bertahan hidup

lebih lama, dengan mengorbankan lingkungannya, masyarakat, dan rakyat. Organisasi pemerintahan amat normal sehingga strukturnya sukar berubah dan cenderung menentang perubahan. Organisasi pemerintahan bersifat makro, diatur pada *level* nasional, sehingga boleh dikatakan relative seragam dimana-mana. Dilihat dari sudut ini, lebih leluasa mengamati organisasi public ketimbang organisasi privat.

Organisasi pemerintahan adalah organisasi permanen, jadi bukan *adhoc*. Organisasi pemerintahan yang diatur pada tingkat nasional tidak merupakan *simple structure*. Organisasi pemerintahan daerah juga relatif masih besar, sehingga strukturnya tidak sederhana. Organisasi pemerintahan nasional dan provinsi dapat bercorak divisional, tetapi organisasi pemerintah kabupaten/kota, relatif tidak. Namun standarisasi output dan outcomenya tetap diperlukan. Dengan demikian, organisasi pemerintahan merupakan kombinasi *machine bureaury*, *professional bureaucracy* dan *divisionalized form*

4. Konsep BUMDes

Menurut Badriyadi (2012) dalam (Amanda, 2015) Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan.

Menurut Saragi menyebutkan ada 4 tujuan pembentukan BUMDes antara lain *pertama*, pengembangan usaha dalam rangka pengentasan

kemiskinan. *Kedua*, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat. *Ketiga*, penyedia jaminan sosial. *Keempat*, penyedia layanan bagi masyarakat desa (Badriyadi, 2012) dalam (Amanda, 2015).

Solekhan (Solekhan, 2014;73) dalam (Chintary dan Asih Widi Lestari, 2016), memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan

tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi (Suwondo: 2015) dalam (Irawati dan Diana Elvianita Martanti, 2017).

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridwan, 2014) dalam (Gufran dan Hajirin, 2019).

Adapun misi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin sebagai berikut:

1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Koto Mesjid dalam mewujudkan kemandirian di segala bidang.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Koto Mesjid untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Koto Mesjid.
3. Menggali dan memberdayakan potensi Desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal Desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta sinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Koto Masjid.

Dari misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KAMPUNG PATIN dipandang cukup penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di desa, maka tentu saja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituntut agar lebih professional demi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Dalam hal ini terdapat beberapa alasan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

1. Alasan ekonomi, sebagai langkah mengoptimalkan ekonomi di desa upaya dan menggali serta mengembangkan sumber daya desa, memberikan pelayanan dan mencari keuntungan,
2. Alasan strategis, mendirikan lembaga usaha melayani kepentingan public, baik investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalisasi yang sangat besar dan luas,
3. Alasan budget, yaitu sebagai upaya pemerintah desa dalam mencari pendapatan diluar pajak, retribusi dan dana pertimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pemerintah desa,
4. Alasan politik, yaitu untuk mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politik bagi pemerintah desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Sentosa Sembiring	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes	Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normative, sementara peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
2.	Robiatul Adawiyah	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes.	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, sementara peneliti melakukan kajian di Kabupaten Kampar.
3.	Helmei Willy Amanda	Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes	Peneliti sebelumnya menggunakan konsep strategi pembangunan desa, sedangkan peneliti menggunakan konsep manajemen.
4.	Gufran dan Hajairin	Pelaksanaan BUMdes dalam	Masalah yang dibahas yaitu	Penelitian sebelumnya

1	2	3	4	5
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa	terkait BUMDes	dilakukan di kabupaten Bima, sementara peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kampar.
5.	Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti	Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes. Dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Gresik, sementara peneliti melakukan pengkajian di Kabupaten Kampar
6.	Amelia Sri Kusuma Dewi	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes	Penelitian sebelumnya menggunakan konsep peranan, sementara pemeliti menggunakan konsep strategi.
7.	Jaryono dan Tohir	Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruh Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	Menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif. Dan masalah yang di bahas yaitu terkait BUMDes.	Peneliti sebelumnya menggunakan konsep kinerja, sementara peneliti menggunakan konsep strategi.
8.	Amelia Sri Kusuma dewi	Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes	Peneliti sebelumnya menggunakan konsep hukum, sementara peneliti

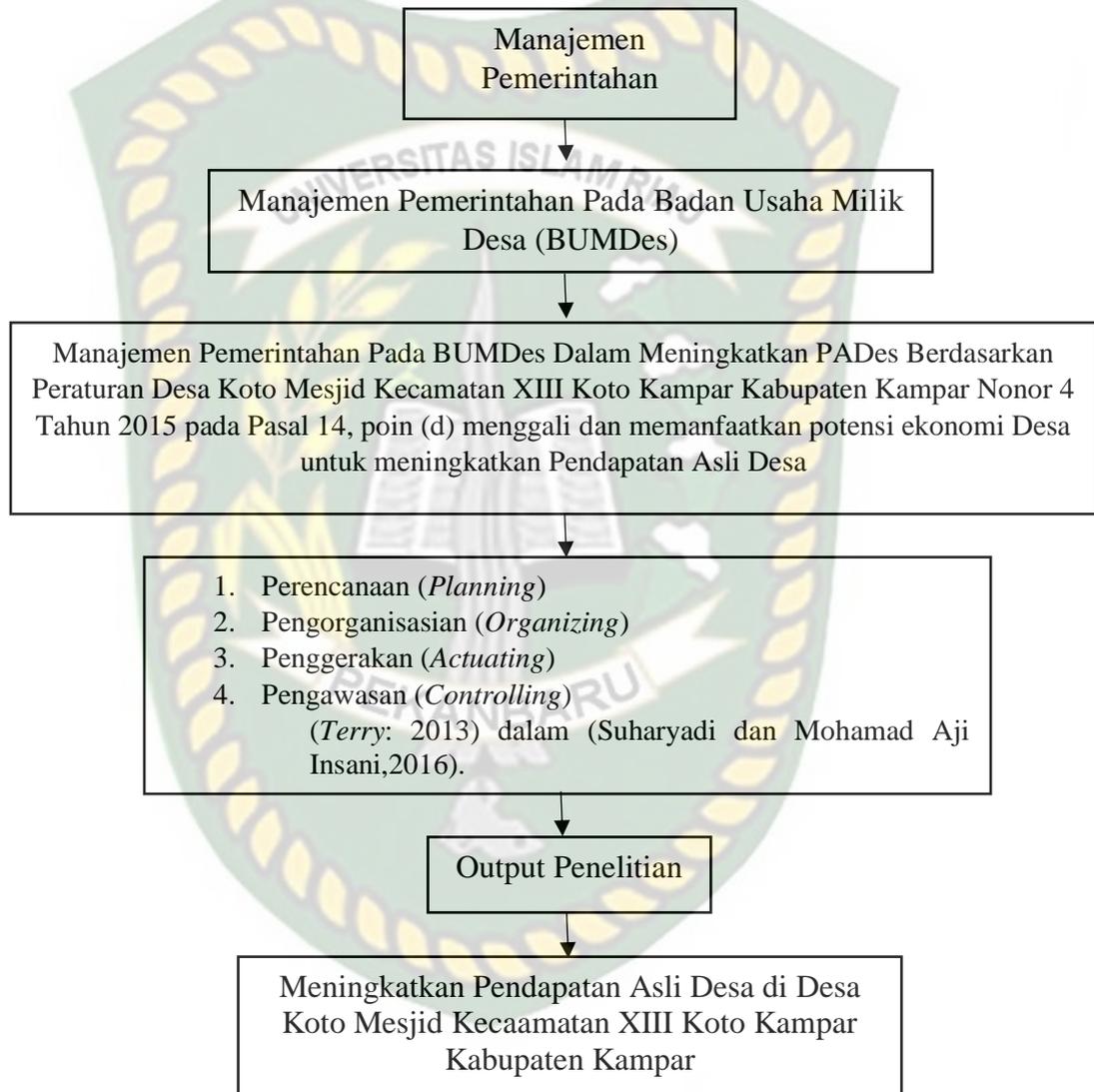
1	2	3	4	5
		sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)		menggunakan konsep strategi
9.	Syahrani Firdaus	Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite Dalam Pengelolaan BUMDes Agrosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Pemalang, sementara peneliti melakukan pengkajian di kabupaten Kampar.
10.	Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari	Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha milik Desa	Masalah yang dibahas yaitu terkait BUMDes	Peneliti sebelumnya menggunakan konsep peran, sementara peneliti menggunakan konsep strategi.

Sumber: Modifikasi Tahun 2020

Dari keseluruhan penelitian di atas belum ada yang secara spesifik melakukan kajian penelitian sehingga penelitian dianggap relatif dan layak untuk dijadikan suatu penelitian.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Model Kerangka Pikir Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.



Sumber: Modifikasi Tahun 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis, di antaranya:

1. Manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
2. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hokum serta undang-undang di wilayah tertentu.
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.
4. BUMDes dalam penelian ini adalah BUMDes KAMPUNG PATIN yang berlokasi di Jalan Poros Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
5. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah adalah bentuk tanggung jawab dari Badan Usaha Milik Desa KAMPUNG PATIN untuk meningkatkan pembangunan desa.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Adapun konsep operasional variabel dapat dilihat pada tabel.

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupate Kampar.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Indikator Dinilai 4
Istilah manajemen dating dari Bahasa Inggris <i>management</i> . Istilah ini terbentuk dari akar kata <i>manus</i> , tangan, yang berkaitan dengan kata <i>managerie</i> yang berarti berternak. <i>Managerie</i> juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan dalam pagar. Kata <i>manus</i> berkaitan dengan kata <i>manage</i> dari Bahasa Latin	Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa	1. Perencanaan (<i>Planning</i>) 2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	1. Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok 2. Kegiatan pengambilan keputusan 1. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan dalam kelompok untuk mencapai tujuan 2. Membagi tugas kepada seorang manager

<p>mansionaticu m yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan <i>effectiveness</i> usaha (“<i>doing right things</i>”) secara <i>efficient</i> (“<i>doing things right</i>”) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam dalam rangka mencapai tujuan organisasion al yang telah ditetapkan (Ndraha, 2015;159)</p>		<p>3. Penggerak (<i>Actuating</i>)</p> <p>4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)</p>	<p>untuk mengadakan pengelompokan.</p> <p>3. Menetapkan wewenang di antara kelompok.</p> <p>1. Mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Kegiatan tersebut sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai.</p> <p>1. Melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya</p>
---	--	--	---

			tujuan dapat tercapai dengan baik.
--	--	--	------------------------------------

Sumber: Modifikasi Tahun 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting (Creswell, 2016;4-5).

Tujuan penelian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang di eksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bias menyatakan rancangan penelitiann yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah “teknis” penelitian ini bersumber dari Bahasa penelitian kualitatif (Creswell, 2016;164).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penulis masih menemukan adanya masalah yang mana masalah tersebut adalah tingginya tingkat penunggakan hutang (kredit macet). Pada data 2019 jumlah debitur yaitu 57 orang dengan jumlah uangnya yaitu Rp. 258.319.930,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)

C. Key Informan dan Informan

a. Key Informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Direktur BUMDes Kampung Patin, karena direktur BUMDes yang bertanggungjawab atas semua pengelolaan unit usaha.

b. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus

bertambah jika penulis merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
2. Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
3. Staf Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
4. Ketua Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
5. Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin Desa Koto Mesjid Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

6. Masyarakat Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari informan, peneliti menggunakan teknik penarikan informan yaitu teknik penarikan *snow ball*. Teknik penarikan ini yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah di tetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atau jawaban yang di berikannya masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang di butuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang di harapkan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya setelah fokus penelitiannya jelas kemungkinan akan di kembangkan menjadi instrumen yang sederhana untuk melengkapi data dan membandingkan dengan hasil wawancara dan observasi.

F. Jenis Dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2016)

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang diteliti untuk di mintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi kualitatif, wawancara kualitatif dan dokumen-dokumen kualitatif.

1. Wawancara kualitatif (*qualitative observation*)

Wawancara kualitatif (*qualitative observation*) adalah kegiatan peneliti dalam melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai meereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur(*un-structured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Creswell, 2016;254).

2. Observasi kualitatif (*qualitative observation*)

Observasi kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian (Creswell, 2016;254).

3. Dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative document*)

Dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative document*) adalah data yang dapat peneliti kumpulkan selama proses penelitian. Dokumen yang dapat peneliti kumpulkan biasa berupa dokumen public (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privt (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail) (Creswell, 2016;255).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga dapat di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menulis memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir (Creswell, 2016;260).

I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah skripsi semestinya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel III.1: Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kbutaten Kampar

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Ags 2020				Sep 2020				Okt 2020				Nov 2020				Des 2020				Jan 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP								■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuesioner											■	■												
5	Analisis Data													■	■	■	■								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Secara Umum Desa Koto Mesjid

1. Sejarah Singkat Desa Koto Mesjid

Desa Koto Mesjid adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sejarah nama dari Koto Mesjid diambil dari nama sebuah Dusun (Kampung) pada waktu Koto Mesjid bergabung dengan Desa Pulau Gadang dan lokasi dari Dusun tersebut berada di Genangan Waduk PLTA Koto Panjang. Desa Koto Mesjid merupakan desa pemekaran dari Desa Pulau Gadang pada tahun 1999 sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 247 Tahun 1999, yang dipimpin oleh Pjs Kepala Desa Bapak Bakaruddin.

Sejarah kepemimpinan Desa Koto Mesjid:

- a. Bakkarudin (1999-2006) Sebagai Pjs. Kepala Desa Koto Mesjid
- b. Chaidir Rahman (2006-2016) Sebagai Kepala Desa Koto Mesjid
- c. Arjunalis (2016-2021) Sebagai Kepala Desa Koto Mesjid

Desa Koto Mesjid merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang termasuk ke dalam daerah genangan PLTA Koto Panjang. Pemandahan penduduk dari Desa Koto Mesjid lama di mulai pada tahun 1990 dan baru berbentuk permukiman pada tanggal 28 Maret 1994. Secara adminitratif Desa Koto Mesjid masuk kedalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 1999.

Masyarakat Desa Koto Mesjid memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Mobilitas ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang keluar dan masuk baik dari Desa Koto Mesjid setiap hari. Mobilitas penduduk ini sangat didukung oleh aksesibilitas wilayah yang cukup mudah baik ke kecamatan, kabupaten dan propinsi. Dengan keberadaan infrastruktur jalan yang tersedia, adapun waktu tempuh dari dan ke Desa Koto Mesjid meliputi:

- a. Ke Ibukota Kecamatan \pm 25 menit
- b. Ke Ibukota Kabupaten \pm 45 menit
- c. Ke Ibukota Propinsi \pm 90 menit

Mobilitas penduduk baik ke ibukota kecamatan, kabupaten dan propinsi didukung oleh armada angkutan umum berupa Minibus *Type L-300*. Selain itu, juga di dukung armada angkutan roda-2. Pada dasarnya, angkutan umum (antar kota dalam propinsi) berbentuk Minibus *Type L-300* merupakan pelayanan angkutan yang melayani masyarakat ke ibukota kabupaten Bangkinang dan Ibukota Propinsi (Pekanbaru).

2. Visi Misi Desa Koto Mesjid

- a. Visi Desa Koto Mesjid

Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis agri bisnis dengan unggulan sector perikanan, dalam suasana masyarakat yang religious, beradat, cerdas, dan bermartabat.

b. Misi Desa Kampung Patin

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelaksanaan dan pembangunan desa
3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan
4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa

3. Luas dan Batas Wilayah Desa Koto Mesjid

Desa luas wilayah Desa 425,5 Ha dan didominasi Lahan Pemukiman, 1.295 Ha, Ladang 122 Ha, Perkebunan 525 Ha, Kolam Ikan 118 Ha, Lapangan 1,5 Ha, lainnya 50 Ha, jumlah penduduk 2.328 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1.194 dan Perempuan 1.134 dengan jumlah KK 728, Desa Koto Mesjid terbagi atas 4 Wilayah Dusun, 18 RT dan 8 RW. Mayoritas masyarakat bermata pencarian petani.

Gambar IV.1. Peta Wilayah Desa Koto Mesjid



Secara Adat wilayah Desa Koto Mesjid merupakan salah satu desa dalam wilayah adat andiko 44, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa silam Kecamatan Kuok.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ulayat Kenegarian Pulau Gadang.
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Merangin Kecamatan Kuok

Jarak Desa Koto Mesjid dengan Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi antara lain :

- a. Jarak dengan Ibukota Kecamatan 15 km
- b. Jarak dengan Ibukota Kabupaten 21 km

- c. Jarak dengan Ibukota Propinsi 99 km

4. Keadaan Penduduk Desa Koto Mesjid

Desa Koto Mesjid merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Desa Koto Mesjid adalah suku Melayu, Pitopang, Piliang, dan Domo. Namun demikian terdapat juga suku lainnya yaitu seperti suku Batak, Jawa, Bugis dan sebagainya. Berikut ini merupakan jumlah mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di 4 (empat) Dusun yaitu Dusun 1 Pincuran Bilah, Dusun 2 Pincuran Gading, Dusun 3 Kampung Baru dan Dusun 4 Kampung Baru.

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdusun Desa Koto Mesjid Tahun 2019

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Total (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pincuran Bilah	298	283	581
2.	Pincuran Gading	200	285	485
3.	Kampung Baru	347	282	629
4.	Kampung Baru	349	284	633
Jumlah		1.194	1.134	2.328

Sumber: Data Desa Koto Mesjid Tahun 2019

5. Perekonomian Desa Koto Mesjid

Pertumbuhan ekonomi di Desa Koto Mesjid saat ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dilihat dari perubahan dan pola hidup masyarakat terutama kemajuan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).

Di Desa Koto Mesjid sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor perikanan, selain itu ada juga di sektor perkebunan dan peternakan.

Tabel IV.2: Identifikasi Sektor Perikanan

No	Sub Sektor	Produksi (ton)	Luas Area (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Ket
1.	Kolam	5-10/Hr	118	85	40-50	517 orang
2.	Tambak	-	-	-	-	
3.	Keramba	235/Hr	1500 unit	-	-	65 orang
4.	Hacteria/Pembelian	1.000.000/bln	0,8	-	-	2 unit

Sumber: Data Desa Koto Mesjid Tahun 2019

Tabel IV.3: Identifikasi Sektor Perkebunan

No	Sub Sektor	Produksi (Ton)	Luas Area (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Ket
1.	Karet	200/bln	518	518	3/Ha	
2.	Kelapa Sawit	13,5/bln	9	9	1,5/Ha	
3.	Pinang	-	-	-	-	
4.	Kalapa	-	-	-	-	
Jumlah		213,5	527	527	1,8	

Sumber: Data Desa Koto Mesjid 2019

Tabel IV.4: Identifikasi Sektor Peternakan

No	Sub Sektor	Populasi
1.	Sapi	21
2.	Kambing	98
3.	Kerbau	-
4.	Domba	-
5.	Ayam ras pedaging	28.500
6.	Ayam Kampung	21.000
Jumlah		49.416

Sumber: Data Desa Koto Mesjid 2019

6. Pemerintahan Desa Koto Mesjid

Desa Koto Mesjid dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Penyelenggaraan Roda Pemerintahan Desa Koto Mesjid di pusatkan pada Kantor Desa Koto Koto Mesjid . Desa Koto Mesjid memiliki 4 (empat) Dusun. Di setiap Dusun yang ada di Desa Koto Mesjid masing-masing memiliki Kepala Dusun.

Tabel IV.5: Susunan Organisasi Pemerintah Desa Koto Mesjid

No	Jabatan	Nama
1.	Arjunalis	Kepala Desa
2.	Yurnalis S.Pd	Sekretaris Desa
3.	Agussalim. J	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Ria Mariana S.Pd	Kaur Keuangan
5.	Ali Akbar	Kaur Perencanaan
6.	Geneper Siddik S.Pi	Kasi Pemerintahan
7.	Hazmi	Kasi kesejahteraan Dan Pelayanan
8.	Ali Yasri	Kepala Dusun I Pincuran Bilah
9.	Ali Akbar	Plt. Kepala Dusun Pincuran Gading
10	Idel Permana	Kepala Dusun III Kampung Baru
11.	Heri Caldra	Kepala Dusun IV Kampung Baru

Sumber: Data Desa Koto Mesjid 2021

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin

1. Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin

Desa Koto Mesjid pada tanggal 16 Maret 2015 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes dan di beri nama Kampung Patin. Dengan didirikannya BUMDes Kampung Patin tersebut

kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset Desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Koto Mesjid.

Pada awal pendiriannya BUMDes Kampung Patin bermodalkan dari sisa Dana Usaha Desa (DUD). Walaupun demikian bukan berarti BUMDes ini akan tidak bisa berkembang, melainkan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes Kampung Patin serta meningkatnya aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari pada penggalian potensi diawal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting adalah sumber daya Tuhan sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha.

2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin

a. Visi

Visi dari pendirian BUMDes KAMPUNG PATIN yaitu
“Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari Dalam Berusaha”.

b. Misi

BUMDes Kampung Patin mempunyai misi sebagai berikut :

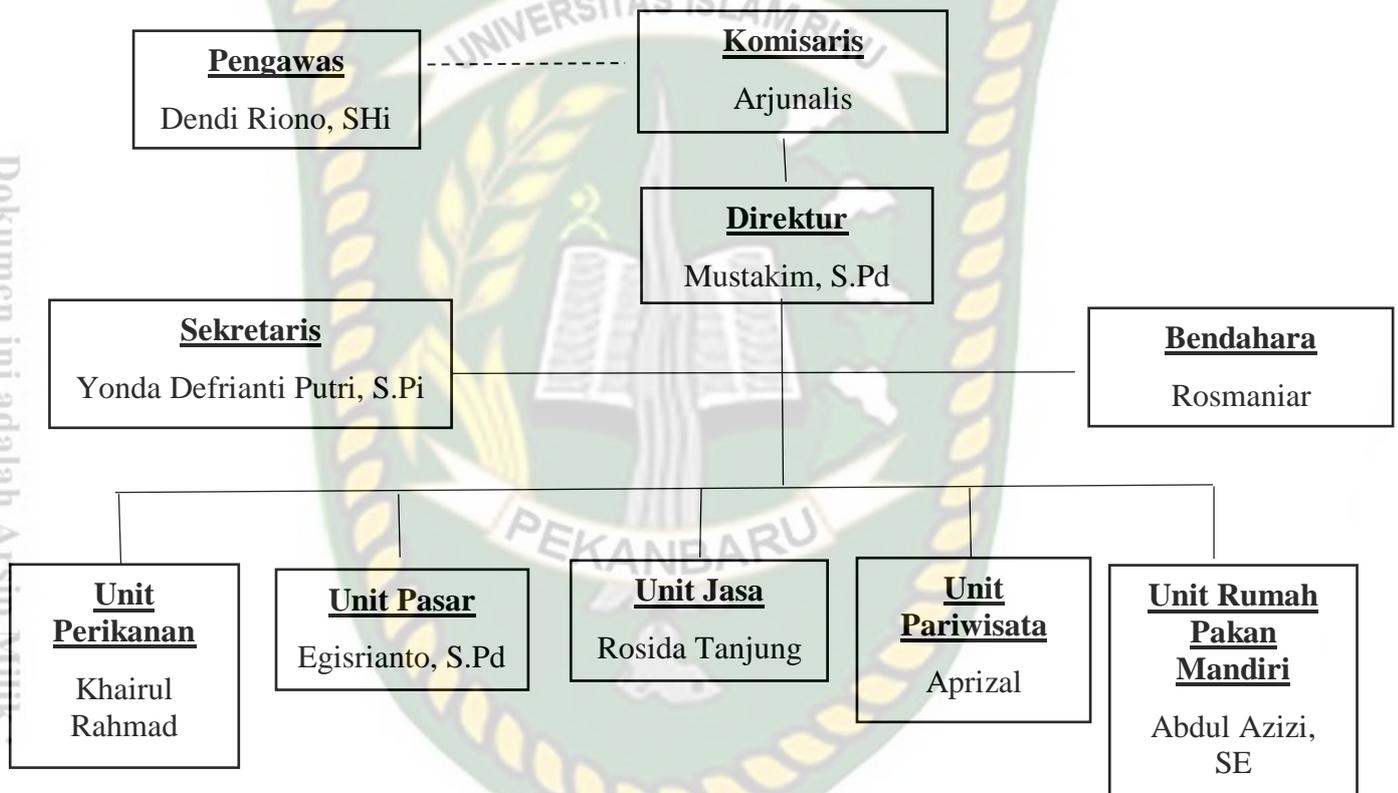
1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Koto Mesjid dalam mewujudkan kemandirian disegala bidang.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Koto Mesjid untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Koto Mesjid.
3. Menggali dan memberdayakan potensi Desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal Desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Koto Mesjid.

3. Struktur Organisasi BUMDes Kampung Patin

Gambar IV.2 Struktur Organisasi BUMDes Kampung patin Penelitian Penulis tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.



Sumber: Data BUMDes Tahun 2019

4. Peran Stuktur Organisasi BUMDes Kampung Patin

a. Komisaris BUMDes Kampung Patin

1. Komisaris sebagai pengawas, yang mengkoordinir dan penasehat jalannya kegiatan BUMDes.
2. Komisaris adalah yang membuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
3. Komisaris sebagai pengamat yang selalu memberikan ide baru yang dapat digunakan oleh BUMDes.
4. Komisaris sebagai desiminasi yang dapat memberikan penjelasan penting untuk perkembangan BUMDes.
5. Komisaris sebagai negosiator yang dapat melakukan perembukan dengan pihak ketiga.
6. Komisaris sebagai pemberi tugas kepada kepala unit usaha dan penyusun rencana usaha BUMDes.
7. Komisaris sebagai penyusun standar kinerja BUMDes.

b. Pengawas BUMDes Kampung Patin

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pengawas adalah:

1. Meminta Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Operasional kepada direktur dan staf setiap akhir tahun.
2. Meminta penjelasan atas kegiatan unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes.

3. Pengawas BUMDes juga memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes.

c. Direktur BUMDes Kampung Patin

1. Memimpin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Merencanakan suatu kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atas persetujuan Pemerintah Desa.
4. Melakukan sebuah tindakan atas nama Lembaga dalam mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
5. Melakukan laporan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Musyawarah Desa.
6. Memberikan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.
7. Mengkoordinasikan tugas seluruh pengurus Badan Usaha Milik Desa.
8. Mengendalikan kegiatan Badan Usaha Milik Desa

d. Sekretaris BUMDes Kampung Patin

1. Mengelola informasi beserta data unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 2. Sekretaris harus menyusun atau membuat laporan kinerja unit usaha
 3. Sekretaris juga harus menyediakan laporan penting yang harus di informasikan kepada pihak yang berkepentingan
 4. Membuat catatan kegiatan-kegiatan penting yang harus di dokumentasikan.
 5. Menyimpan dokumen atau file penting yang berhubungan dengan kegiatan unit usaha BUMDes.
- e. Bendahara BUMDes Kampung Patin
1. Bendahara sebagai orang yang membayar transaksi yang dilakukan oleh unit usaha BUMDes.
 2. Bendahara sebagai orang yang menerima pembayaran dari transaksi oleh unit usaha BUMDes.
 3. Bendahara sebagai orang yang melakukan pencatatan seluruh transaksi uang masuk dan keluar oleh unit usaha BUMDes.
- f. Kepala Unit Usaha BUMDes Kampung Patin
1. Kepala Unit Usaha sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
 2. Kepala Unit Usaha sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.

3. Kepala Unit Usaha sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
4. Kepala Unit Usaha sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Kepala Unit Usaha bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas *Informan*

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pertanyaan mengenai identitas *key informan* dan *informan* penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas *key informan* dan *informan*, *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini yaitu seseorang yang memberikan informasi yang diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari Direktur BUMDes Kampung Patin, Bendahara BUMDes Kampung Patin, Kepala Unit Usaha Perikanan, Pengawas BUMDes Kampung patin, Komisaris BUMDes Kampung Patin dan Masyarakat.

Dalam penelitian tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, penulis ingin menjelaskan identitas *key informan* dan *informan* yang diteliti. Hal yang akan dijelaskan tentang pembahasan ini adalah nama *informan*, umur *informan*, jabatan dan Pendidikan *informan*.

Untuk mengetahui identitas *key informan* dan *informan* bisa dilihat dari tabel keterangan dibawah ini, yaitu:

Tabel V.1 Nama *Key Informan* dan *Informan* Penelitian Penulis tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mustakim, S.Pd	Direktur BUMDes Kampung Patin	Key Informan
2.	Rosmaniar	Bendahara BUMDes Kampung Patin	Informan
3.	Khairul Rahmad	Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin	Informan
4.	Dendi Riono, S.Hi	Pengawas BUMDes Kampung Patin	Informan
5.	Arjunalis	Komisaris BUMDes Kampung Patin	Informan
6.	Nursam	Masyarakat	Informan

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

Pada table diatas dapat dilihat bahwa *key informan* dan *informan* yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari satu *Key informan* yaitu Direktur BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid dan lima orang *Informan* yaitu Bendahara BUMDes Kampung Patin, Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin, Pengawas BUMDes Kampung Patin, Komisaris BUMDes Kampung Patin, dan Masyarakat sebagai orang yang memakai hasil produksi BUMDes Kampung Patin.

1. Usia *Informan*

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia *key informan* dan *informan* yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman *informan*

terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi sesuatu permasalahan maka pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur *informan*, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2 Usia Key Informan dan Informan dalam Penelitian Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1.	15-25	-	-
2.	25-35	2	30%
3.	35-45	2	30%
4.	45-55	1	15%
5.	55-65	1	15%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri Direktur BUMDes Kampung Patin, Bendahara BUMDes Kampung Patin, Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin, Komisaris BUMDes Kampung Patin, Pengawas BUMDes Kampung Patin, dan Masyarakat berdasarkan kriteria umur terdiri dari 2 orang dengan kriteria umur 25-35 tahun dengan presentase 30%, 2 orang dengan kriteria umur 35-45 tahun dengan presentase 30%, 1 orang dengan

kriteria umur 45-55 tahun dengan presentase 15%, dan 1 orang dengan kriteria umur 55-65 tahun dengan presentase 15%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin *key informan* dan *informan* tidak berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan selama *key informan* dan *informan* tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin *informan* tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap sesuatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat tabel berikut:

Tabel V.3 Jenis Kelamin Key Informan dan Informan dalam Penelitian tentang Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pria	4	60%
2.	Wanita	2	40%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui *key informan* dan *informan* yang terdiri dari Direktur BUMDes Kampung Patin, Bendahara BUMDes Kampung Patin, Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin, Komisaris BUMDes Kampung Patin, Pengawas BUMDes Kampung Patin, dan Masyarakat berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 4

orang berjenis kelamin laki-laki dengan presentasi 60%, dan 2 orang berjenis kelamin perempuan dengan presentase 40%.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu Penelitian Jawaban yang diberikan oleh *key informan* dan *informan* dari hasil menjawab pertanyaan yang di ajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarekan jawaban dari setiap *informan* tentunya tidak akan sama persis antara *informan* satu dengan *informan* lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain di pengaruhi oleh tingkat pemahaman *informan* terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman *informan* juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Patin Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dilihat dari tingkat pendidikan *key informan* dan *informan* dalam penelitian Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut:

Table V.4 Tingkat Pendidikan *Key Informan* dan *Informan* dalam penelitian Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendaopatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	1	15%
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	15%

3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	30%
4.	Diploma III (D3)	-	-
5.	Srta 1 (S1)	2	15%
6.	Magister (S2)	-	-
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri dari Direktur BUMDes Kampung Patin, Bendahara BUMDes Kampung Patin, Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin, Komisariss BUMdes Kampung Patin, Pengawas BUMDes Kampung Patin, dan Masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 1 orang berpendidikan SD dengan presentase 15%, 1 orang berpendidikan SMP dengan presentase 15%, 2 orang berpendidikan SMA dengan presentase 30%, dan 2 oang berpendidikan S1 dengan presentase 30%.

B. Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes,

maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai roda penggerak perekonomian di Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid. Untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagaimana pada pembahasan dibawah ini:

1. Perencanaan (*planning*)

Yang dimaksud dengan perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi bersifat esensial,

karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi manajemen yang lain.

Perencanaan ini menunjukkan bagaimana manajemen Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* yaitu bapak Mustakim, S.Pd sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB mengenai apa saja jenis-jenis kegiatan yang direncanakan atau yang telah dilakukan oleh BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan yaitu membuka unit-unit usaha. Pertama, unit pakan mandiri. Kedua, unit budidaya perikanan ikan patin. Ketiga, unit pelayanan jasa BRILink. Keempat, unit pasar desa. Kelima, unit pariwisata”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan dari masyarakat dengan berdirinya BUMDes Kampung Patin, bapak Mustakim, S.pd memberikan jawabannya:

“Tanggapan masyarakat beragam, ada masyarakat yang mendukung dan ada pula masyarakat yang tidak mendukung. Masyarakat yang mendukung seperti yang BUMDes memberikan bantuan pakan, sehingga masyarakat yang kekurangan modal bisa terbantu dengan pemberian pakan mandiri dari BUMDes, dengan cara pembayaran diakhir panen. Jadi masyarakat tinggal memberikan makan ikannya, BUMDes yang memberikan pakannya dan BUMDes juga yang mengurus pasca panennya. Sedangkan tanggapan dari masyarakat kurang pro yaitu mereka tetap menginginkan

adanya simpan pinjam sedangkan ketika BUMDes melakukan simpan pinjam maka tingkat kredit macet itu sangat tinggi”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai siapa yang berwenang menetapkan perencanaan prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan unit usaha BUMDes Kampung Patin di Desa Koto Mesjid, Bapak Mustakim, S.pd Memberikan jawabannya:

“Yang paling berwenang adalah keputusan hasil rapat dari pengurus. Jadi di dalam BUMDes tidak ada otoritas mutlak, jadi setiap perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan dalam unit usaha di BUMDes yaitu membutuhkan dahulu rapat pleno antara pengurus, pengawas, dan komisaris”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai penetapan tujuan keuntungan di dalam BUMDes itu perlu, meskipun unit usaha tidak memberikan keuntungan yang besar di dalam BUMDes Kampung Patin, Bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Tujuan untuk memberikan keuntungan pasti perlu karena itu diatur dalam Permendes bahwa BUMdes harus menjadi lokomotif ekonomi masyarakat desa dan juga harus bisa memberikan pendapatan asli pada desa”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai cara BUMDes Kampung Patin menggali dan memetakan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Sebelum BUMDes menjalankan unit usahanya, BUMDes harus memetakan dahulu sehingga setelah unit usaha terbentuk, BUMDes sudah memiliki arah tujuan dari unit usaha tersebut sehingga ketika dijalankan pengurus tidak gagap lagi menjalankan unit usaha yang sudah di petakan bersma pengawas, dan komisaris. Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian di desa dengan cara salah satunya yaitu BUMDes memberikan pakan ikan kepada orang yang membutuhkan pakan ikan, dengan BUMDes yang melakukan atau mengurus panen dan pasca panennya. Dengan

harapan dapat lebih maju lagi, dan memberikan pendapatan asli pada desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Bapak Mustakim, S.Pd, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dalam indikator Perencanaan (*Planning*) cukup berperan, hal ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok, dan kegiatan pengambilan keputusan.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin yaitu Bapak Khairul Rahmad pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 13.30 WIB mengenai apa saja rencana kegiatan yang akan dilakukan BUMDes Kampung Patin di dalam Unit Usaha Perikanan, bapak Khairul Rahmad memberikan pendapatnya:

“Saya selaku Kepala Unit Usaha Perikanan tentu memberikan yang terbaik untuk BUMDes Kampung Patin, rencana saya selaku Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin saya akan mengembangkan lagi penjualan ikan asap patin, dan ikan patin segar dengan cara mencari pedagang besar atau toke salai dan menjualnya kepada mereka, karena ikan asap patin sangat terkenal sekali di Desa kita ini. Tentunya jika penjualan ikan asap patin tinggi di pasar dan otomatis keuntungan yang di dapat oleh Unit Usaha Perikanan juga tinggi. Dan sekarang Unit Usaha BUMDes Kampung Patin juga menyediakan sewa kolam unuk membudidayakan ikan patin”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Perencanaan (*Plainning*) cukup berperan, ini dibuktikan terhadap sub indikator yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan kegiatan pengambilan keputusan. Dari wawancara dengan Bapak Khairul Rahmad bisa kita lihat dengan Unit Usaha Perikanan BUMDes yang ingin di kembangkan pemasaran ikan patin asap dan ikan patin segar serta sewa kolam bagi pengusaha atau orang yang membutuhkan kolam untuk membudidayakan ikan patin, tentunya ini juga berpengaruh yang sangat positif untuk meningkatnya Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara BUMDes Kampung Patin yaitu Ibuk Rosmaniar pada hari Kamis tanggal 7 januari 2021 pada pukul 14.30 WIB mengenai bagaimana cara menyusun rencana keuangan BUMDes Kampung Patin, ibuk Rosmaniar memberikan pendapatnya:

“Cara ibuk menyusunnya dengan cara ibuk membuat uang masuk dan uang keluar setiap bulannya, uang masuk yaitu berupa setoran perunit usaha misalnya seperti keuntungan yang di peroleh unit usaha, dan uang keluarannya seperti kebutuhan yang diperlukan oleh pengurus BUMDes seperti printer. Dan ibuk juga membuat setiap uang keluarannya kwitansi jika yang dibeli berupa barang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Rosmaniar, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Perencanaan (*planning*) cukup berperan, ini di buktikan terhadap sub indikator yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kegiatan pengambilan keputusan. Dari wawancara dengan Ibuk Rosmaniar kita tahu bahwa kegiatan yang dilakukan ibuk Rosmaniar yaitu berdasarkan sub indikator menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan yaitu melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar di setiap bulannya, dan untuk menjaga supaya tidak keliru nantinya jika ada barang yang di beli itu di buat kan kwitansi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Koto Mesjid yaitu Ibuk Nursam, pada hari Senin tanggal 25 januari 2021 pukul 10.00 WIB, mengenai bagaimana tanggapan masyarakat dengan berdirinya BUMDes Kampung Patin dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kedepannya:

“Tanggapan saya terhadap berdirinya BUMDes adalah dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Koto Mesjid, dan mengenai rencana kegiatan yang akan atau bahkan telah dijalankan oleh BUMDes sangat membantu masyarakat yang memang membutuhkan di sector perikanan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Nursam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid dalam indikator Perencanaan (*planning*) cukup berperan, ini di buktikan terhadap sub indikator yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kegiatan pengambilan keputusan.

Dengan di laksanakan kegiatan unit usaha oleh BUMDes maka pengurus BUMDes telah menetapkan juga pekerjaan masing-masing.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid dalam indikator Pengawasan cukup berperan, ini di buktikan dari wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terhadap sub indikator yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kegiatan pengambilan keputusan.

Dari observasi yang di lakukan di lapangan peneliti menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Koto Masjid dalam sebelum melakukan pembagian unit usahanya, pengurus melakukan perencanaan terlebih dahulu seperti unit usaha apa yang didirikan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Koto Masjid. Dan juga tidak lupa dengan melihat ekonomi masyarakat yang lebih dominan arahnya kemana, seperti perikanan. Dan juga BUMDes mendirikan unit usaha jasa, seperti yang di butuhkan masyarakat setempat namun tidak ada di desa, seperti BRILink (tarik tunai, dan transfer).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sub-sistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Aktivitas yang dimaksud bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau sesaat saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang memiliki pola atau urutan yang dilakukan secara relative teratur dan berulang-ulang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* yaitu Bapak Mustakim, S.Pd sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB mengenai apa yang membedakan BUMDes Kampung Patin dengan BUMDes di desa lain, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“BUMDes Kampung Patin pasti berbeda dengan BUMDes di desa lain, karna BUMdes itu mengikuti tipologi yang ada di desa dan potensi masing-masing desa juga berbeda, kalau BUMDes Kampung Patin unit usaha yang paling menonjol adalah di bidang perikanan, begitu pula dengan BUMDes lain mereka menonjolkan apa yang menjadi potensi desa mereka”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa pembagian kelompok unit usaha harus dilakukan di BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid, bapak Mustakim, S.Pd menjawab:

“Karna setiap unit usaha harus dijalankan oleh satu orang kepala unit, kalau dicampur nanti akan susah untuk membuat laporan dan akan susah untuk menjalankan usaha tersebut”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai siapa yang berwenang melakukan pembagian tugas kepada setiap anggota di BUMDes

Kampung Patin Desa Koto Mesjid, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Yang paling berwenang yaitu direktur BUMDes dengan persetujuan pengawas dan komisaris”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai kapan dilakukan pembagian tugas anggota BUMDes Kampung Patin, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Pebagian tugas itu dilakukan saat penetapan SK, jadi dalam SK itu ditetapkan langsung siapa kepala unit, siapa direktur, siapa bendahara, siapa sekretaris”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Bapak Mustakim S.Pd, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid cukup berperan, ini dibuktikan dari sub indikator membagi tugas komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan dalam kelompok untuk mencapai tujuan, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan, dan menetapkan wewenang di antara kelompok. Pembagian tugas pengelola atau pengurus BUMDes Kampung Patin telah dilakukan saat penetapan SK, sudah sejak awal tugas pengurus atau pengelola itu ditetapkan, sebelum dilaksanakan kegiatan unit usaha pada BUMDes Kampung Patin.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad sebagai Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021

pukul 13.30 WIB, mengenai siapa yang berwenang melakukan pembagian tugas kepada setiap anggota di BUMDes Kampung Patin Desa Koto Mesjid, bapak Khairul Rahmad memberikan pendapatnya:

“Kalau untuk unit usaha yang berwenang melakukan pembagian tugasnya adalah kepala unit, karena kepala unit yang mengambil alih semua kegiatan di unit usaha berdasarkan persetujuan direktur, pengawas, dan komisaris”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai kapan dilakukan pembagian tugas anggota BUMDes Kampung Patin, bapak Khairul rahmad menjawab;

“Saat penetapan SK, pada saat itu tugas masing-masing pengurus atau pengelola di tetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid cukup berperan, ini di buktikan dari sub indikator membagi tugas komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan dalam kelompok untuk mencapai tujuan, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan, dan menetapkan wewenang di antara kelompok. Dengan di lakukan pembagian tugas kelompok ini maka masing-masing pengurus atau pengelola yang sesuai dengan bidangnya bisa memfokuskan unit usaha yang telah berdiri dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara BUMDes Kampung Patin yaitu Ibuk Rosmaniar pada hari Kamis tanggal 7 januari 2021 pada pukul 14.30 WIB, mengenai bagaimana cara Bendahara BUMDes membagi modal untuk setiap unit usaha agar berjalan lancar, ibuk Rosmaniasr memberikan pendapatnya:

“Cara kami untuk membagi modal adalah dengan melakukan pengelompokan kegiatan yang membutuhkan modal yang sangat besar dan memfokukannya terlebih dahulu ke unit usaha itu dengan selalu berkoordinasi dengan pengawas dan komisaris”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Rosmaniar, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Mesjid cukup berperan, ini di buktikan dari sub indikator yaitu membagi tugas komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan dalam kelompok untuk mencapai tujuan, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan, dan menetapkan wewenang di antara kelompok. Dengan dilakukannya pembagian kegiatan modal perunit usaha maka pengelola atau pengurus BUMDes bisa memfokuskan suatu unit usaha agar berkembang lebih pesat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Koto Mesjid yaitu Ibuk Nursam, pada hari Senin tanggal 25 januari 2021 pukul 10.00 WIB, bagaimana peran

masyarakat dalam pengorganisasian BUMDes, ibuk Nursam memberikan pendapatnya:

“Masyarakat hanya sebagai pemakai produk yang disediakan BUMDes di desa ini, seperti pakan ikan, atau sewa kolam ikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Nursam, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Masjid cukup berperan, ini di buktikan dari sub indikator yaitu membagi tugas komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan dalam kelompok untuk mencapai tujuan, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan, dan menetapkan wewenang di antara kelompok. Dengan pemakaian produk dari BUMDes maka tujuan BUMDes sampai ke masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid dalam indikator Pengorganisasian cukup berperan, ini di buktikan dari wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terhadap sub indikator yaitu membagi tugas komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan dalam kelompok untuk mencapai tujuan, membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan, dan menetapkan wewenang di antara kelompok.

Dari observasi yang dilakukan di lapangan peneliti menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Koto Mesjid dalam melaksanakan proses pelaksanaan kegiatannya terdapat unsur pembagian tugas kepada anggota berdasarkan SK yang ditetapkan. Dan dalam indikator pengorganisasian ini terdapat juga fokusnya ke satu unit usaha yang memang berkembang dengan pesat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

3. Penggerak (*Actuating*)

Yang dimaksud dengan penggerak adalah untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *key informan* yaitu Bapak Mustakim, S.Pd sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB mengenai kapan tercapainya target BUMDes terhadap kegiatan atau unit usaha yang telah dilakukan dengan tujuan berdirinya BUMDes yang salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Desa, bapak Mustakim, S.Pd menjawab:

“Setiap tahun, setiap itu dievaluasi. Tercapai atau tidak tercapainya itu terlihat pada Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai dari mana sumber dana BUMDes Kampung Patin, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Sumber dana BUMDes itu mulai dari dana desa, dan juga bantuan keuangan provinsi atau disebut BKK”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara Direktur BUMDes Kampung Patin memberikan saran kepada anggota agar bekerja secara optimal atau bekerja lebih giat, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Caranya yaitu dengan memberikan motivasi, memberikan reward, dan memberikan apresiasi ketika mereka berhasil”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana BUMDes Kampung Patin dengan beberapa unit usahanya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid, bapak Mustakim S.Pd memberikan jawabannya:

“Cara BUMDes Kampung Patin untuk meningkatkan atau memberikan pendapatan asli pada desa yaitu yang pertama, menyediakan dan memberikan bantuan pakan kepada orang yang memerlukan pakan ikan yang jika umue ikan sudah cukup di pane BUMDes lah yang mengurus panen dan pasca panennya. Kedua, BUMDes Kampung Patin juga mengatur kegiatan pengelolaan pasar dan mengontrol serta mengelola keuangan pasar, misalnya meminta sewa kepada pedagang di pasar dan mempergunakan uang sewa untuk perbaikan pasar jika ada kerusakan. Ketiga, BUMDes Kampung Patin juga menyediakan jasa yaitu BRILink, seperti transfer uang dan penarikan tunai yang sekali transaksi bisa dikenakan Rp.5.000. Keempat yaitu dengan menyediakan mobil odong-odong yang sekali masuk yaitu Rp. 5.000. perorangnya, begitu juga dengan harga tiket untuk wisata alam sugai gagak dan puncak Kompe yaitu Rp. 5.000. perorang. Kelima BUMDes Kampung Patin juga menyediakan Ikan patin segar, ikan asap patin, dan juga membudidayakan ikan patin. Beberapa hal yang sudah saya

sebutkan, BUMDes Kampung Patin cukup banyak memberikan pendapatan asli untuk desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Bapak Mustakim S.Pd, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Penggerak cukup berprean, hal ini di buktikan dari sub indikator yaitu mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah di tetapkan dan kegiatan sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. BUMDes melaksanakan kegiatannya berdasarkan unsur perencanaan yang dilakukan di awal terbentuknya BUMDes dan melakukan pengelompokan kegiatan, seperti menetapkan kepala unit usaha dan pembagian tugas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad sebagai Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 januari 2021 pukul 13.30 WIB, mengenai kapan tercapainya target unit usaha perikanan yang telah dilakukan dengan tujuan berdirinya BUMDes yang salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Desa, bapak Khairul Rahmad memberikan pendapatnya:

“Kita melihat tercapainya sebuah target unit usaha ini ketika kita melakukan setoran setiap bulannya apakah ada peningkatan atau penurunan”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin memberikan saran kepada

anggota agar bekerja secara optimal atau bekerja lebih giat, bapak Khairul Rahmad memberikan pendapatnya:

“Saya hanya memberikan motivasi kepada anggota yang bekerja”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Penggerak cukup berperan, hal ini di buktikan dari sub indikator yaitu mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah di tetapkan dan kegiatan sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Dengan BUMDes Kampung Patin melanjutkan unit usaha yang potensinya sangat kuat di Desa, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* masyarakat Desa Koto Mesjid yaitu Ibuk Nursam, pada hari Senin tanggal 25 januari 2021 pukul 10.00 WIB, mengenai apa tanggapan ibuk terhadap ada atau tidaknya pihak BUMDes berkoordinasi dengan masyarakat Desa Koto Mesjid, ibu nursam memberikan pendapatnya:

“Menurut saya masyakat BUMDes kurang menjalin koordinasi dengan masyarakat, contohnya saja seperti unit usaha Simpan Pinjam itu diberhentikan. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha baru selain membudidayakan ikan air tawar. Kadang-kadang ada orang di desa ini yang ingin mencoba peluang usaha di bidang lain”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan ibuk sebagai masyarakat terhadap unit usaha yang telah di jalankan oleh BUMDes Kampung Patin, ibuk Nursam memberikan pendapatnya:

“Unit usaha yang telah dilaksanakan BUMDes itu sebenarnya sudah sangat bagus, seperti saya yang sudah tidak memusingkan lagi pakan ikan, dan setelah panennya, soalnya sudah diurus oleh BUMDes. Akan tetapi jika Simpan Pinjam dibuka banyak juga yang membutuhkan modal untuk usaha lain dan kami sebagai masyarakat kami perlu lagi meminjam uang kepada koperasi keliling atau pinjaman uang Pancasila”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai unit usaha simpan pinjam, apa-apa saja faktor dari masyarakat yang menunggak pembayaran pinjaman di unit usaha tersebut, ibuk Nursam memberikan pendapatnya:

“Faktor tidak membayar yaitu minimnya keuangan yang dimiliki oleh kami selaku peminjam, terkadang usaha yang dimiliki ada macet-macetnya, apalagi pada saat seperti sekarang ini untuk ada uang untuk makan saja sudah alhamdulillah ya nak. Dan terbawa oleh lingkungan dikampung juga, karna banyak masyarakat lain yang tidak membayar pinjaman tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Nursam, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Penggerak kurang berperan, hal ini di buktikan dari sub indikator yaitu mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah di tetapkan dan kegiatan sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat

tercapai. Ketika Masyarakat masih membutuhkan modal usaha dari Unit Usaha Simpan Pinjam, namun Unit usaha itu diberhentikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Penggerak kurang berperan, ini di buktikan dari wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terhadap sub indikator yaitu mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah di tetapkan dan kegiatan sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai.

Dari observasi yang di lakukan di lapangan peneliti menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Koto Mesjid dalam melaksanakan kegiatannya karena masih terdapat masyarakat yang mengunggak pembayaran pada unit usaha Simpan Pinjam di BUMDes Kampung Patin. Pengurus BUMDes Kampung Patin kurang tegas dalam menegur masyarakat yang menunggak pembayaran, dan juga masih adanya masyarakat yang mengeluh mengapa unit usaha Simpan Pinjam di berhentikan padahal masyarakat masih membutuhkan modal usaha.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu proses untuk menrapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan dan meroksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan susai

dengan rencana awal. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* yaitu bapak Mustakim, S.Pd sebagai Direktur Badan Usaha Mlik Desa Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB mengenai apa saja tindakan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap unit usaha BUMDes Kampung Patin yang mengalami masalah, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Akan menanyakan terlebih dahulu kepada kepala unit, kalau memang tidak ada solusi akan direktur ajukan ke pengawas dan komiaris, dan kalau memang unit usaha itu tidak menguntungkan makan kita akan tutup”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai mengapa unit usaha BUMDes yang telah berdiri, namun ketika tidak berjalan lancar dengan semestinya harus diberhentikan, bapak Mustakim, S.Pd memberikan jawabannya:

“Karna konsep dari BUMDes ada 2 (dua) yaitu memberikan pemberdayaan dan memberikan keuntungan, ketika dua hal itu tidak tercapai maka sudah semestinya itu sudah harus di tutup”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Bapak Mustakim S.Pd, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Pengawasan cukup berperan, ini dilihat dari sub indikator yaitu melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat penyimpangan yang tidak diinginkan supaya tujuannya dapat tercapai dengan baik. BUMDes Kampung Patin dalam pelaksanaan kegiatannya selalu berkoordinasi atau menjalin komunikasi yang baik dengan Komisaris dan Pengawas. Begitu juga dengan keputusan yang diambil, mereka selalu menjalin komunikasi yang baik agar tercapai tujuan dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Komisaris BUMDes Desa Koto Mesjid yaitu Bapak Arjulis pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul 10.30 WIB, mengenai bagaimana cara komisaris memberikan masukan terhadap unit usaha BUMDes baik yang mengalami masalah seperti Simpan Pinjam atau tidak mengalami masalah, bapak Arjunalis memberikan pendapatnya:

“Yang pertama saya lakukan adalah memanggil Direktur BUMDes, yang kedua jika masalah tidak selesai atau pun ingin evaluasi yang lebih besar, dan saya suruh BUMDes mengadakan musyawarah, Nah disitulah kita bahas bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menindak lanjutinya”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai seperti apa peran komisaris melakukan terhadap BUMDes dalam melakukan evaluasi kegiatan unit usaha yang telah dilakukan, bapak Arjunalis memberikan pendapatnya:

“Peran saya sebagai Komisaris yang pertama sekali, mereka setiap bulannya memberi laporan bulanan disana saya evaluasi, saya periksa”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana pandangan bapak selaku Komisaris terhadap BUMDes Kampung Patin dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, bapak Arjunalis memberikan pendapatnya:

“Pandangan saya terhadap BUMDes ini cukup baik, karena mereka bekerja sangat tekun sekali. Begitu pula dengan unit usahanya yang semakin hari memiliki perkembangan jauh diluar pemikiran saya, adapun untuk Pendapatan Asli Desa BUMDes membuat usaha yang sesuai dengan potensi desa yaitu di sektor budidaya ikan patin, hal ini juga tentu membantu Pendapatan Asli Desa Bertambah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Arjunalis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Pengawasan cukup berperan, ini dilihat dari sub indikator yaitu melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat penyimpangan yang tidak diinginkan supaya tujuannya dapat tercapai dengan baik. BUMDes Kampung Patin melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Pengawas BUMDes Kampung Patin yaitu Bapak Dendi Riono,

SHi pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 14.30 WIB, mengenai bagaimana cara Pengawas memberikan masukan terhadap Direktur BUMDes Kampung Patin terhadap kegiatan yang mengalami masalah, bapak Dendi Riono SHi memberikan pendapatnya:

“Pengawas merupakan suatu unsur dari banyak unsur yang ada dalam BUMDes, tentu saja ada mekanisme yang dilalui, dalam berbagai kegiatan yang kemudian mengalami permasalahan tentu kita kembali ke SOP yang ada. SOP tentang pengelolaan terhadap Unit-unit tertentu. Nah, SOP itu kita buat di awal dan disertai dengan berita acara, tentu kita tidak akan lari dari SOP yang ada. Nah tentu saja kita tidak akan cari jalan lain kecuali mengacu pada SOP yang ada “.
Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana peran bapak

sebagai Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap BUMDes Kampung Patin, bapak Dendi Riono SHi memberikan pendapatnya:

“Peran pengawas sekali lagi ada standar yang mengatur tentang bagaimana pengawasan di BUMDes, cumin ada secara teknis untuk pembagian pengawasan umpamanya kit aitu ada beberapa unit usaha untuk memudahkan pengawasan itu, sesuai dengan kompetensi masing-masing kita bagi pengawasan itu berdasarkan kompetensi yang ada. Umpamanya ahli dalam perikanan tentu kita letakkan pengawasnya itu orang yang ahli dalam perikanan. Pengawasan tentang unit usaha pariwisata umpanya tentu kita letakkan pula orang yang memang pengawas yang konsennya di bidang wisata. Dari sana nanti secara umum barulah kita ramu proses pengawasannya itu dalam rapat evaluasi oleh pengawas, kemudian nanti baru ada berita acaranya bagaimana kemudian system dan kerja dalam BUMDes itu sesuai tidak dengan SOP dengan aturan yang sudah diatur sebelumnya secara bersama-sama, dan menurut aturan pengelolaan BUMDes itu sendiri”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan bapak terhadap unit usaha yang tidak berjalan dengan semestinya namun

harus diberhentikan, seperti simpan pinjam, bapak Dendi Riono SHi memberikan pendapatnya:

“Perlu di garis bawahinya sebenarnya, dulu ada namanya unit simpan pinjam di BUMDes, ketika unit simpan pinjam itu memiliki masalah dan masalahnya itu rentan sebenarnya. Dan ini menyangkut terhadap proses perkembangan BUMDes itu sendiri, sebenarnya unit simpan pinjam itu bukan kita berhenti selamanya, tidak. Sebenarnya itu menyangkut proses pembelajaran di tengah-tengah masyarakat, karna asumsi kita bahwa ketika unit simpan pinjam dulu ada, kemudian di berikan pinjaman dalam bentuk uang kepada masyarakat, nah ini banyak yang salah guna, umpamanya pinjaman itu digunakan untuk usaha kemudian oleh pemanfaat tidak digunakan untuk usaha, malah digunakan untuk yang lain. Nah, makanya dengan kondisi yang ada seperti itu kita coba alihkan focus pemberdayaan itu dalam bentuk barang. Kita fokuskan ke unit pembesaran ikan, ada unit perikanan, ada pakan mandiri ketika masyarakat atau pemanfaat mau berusaha pembesaran ikan kita tidak memberikan uang, akan tetapi kita memberikan bahan baku, supaya tepat sasaran dan benar-benar di gunakan untuk usaha itu sendiri, tidak digunakan untuk yang lain. Sebenarnya di suatu sisi unit simpan pinjam itu pada dasarnya hanya di bekukan sementara saja atau di alihkan kedalam bantuan atau pinjaman bentuk barang bukan dalam bentuk uang “.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana menurut Pengawas BUMDes Kampung Patin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, bapak Dendi Riono SHi memberikan pendapatnya:

“Sebenarnya BUMDes itu disamping pemberdayaan masyarakat yang tidak kalah pentingnya sebagai penopang desa sebenarnya. Contohnya Desa Koto Masjid dalam 2 tahun terakhir itu sangat luar biasa untuk mendongkrak pendapatan asli desa disamping masyarakat bisa terbantu dalam berusaha disisi lain BUMDes bisa memberikan presentasi yang cukup banyak dalam usaha meningkan Pendapatan Asli Desa. Pada tahun 2020 alhamdulillah BUMDes progresnya sangat luar biasa pendapatan bersihnya itu diangka 67 juta yang sebelumnya diangka 21 juta, jadi memnag progresnya sangat luar biasa, kalau kita berandai-andai, kalau seandainya desa tidak siap hari ini atau tidak bersiap-siap diawal-awal seperti

ini ketika nanti Dana Desa tidak ada lagi maka salah satu penopang untuk pendapatan desa salah satunya dari BUMDes tentunya. Dan alhamdulillah Desa Koto Mesjid untuk tahun 2020 usaha-usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup lumayan besar, tapi kita tidak berhenti sampai di situ karena kita lihat dilapangan sesungguhnya BUMDes masih banyak bisa melakukan inovasi dan pengembangan sehingga desa akan jauh lebih banyak mendapatkan Pendapatan Asli Desa, insyaallah BUMDes akan memberikan pemasukan-pemasukan yang tidak kalah menjajikan untuk pengembangan desa itu sendiri dan pengembangan BUMDes kedepan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Informan* yaitu Bapak Dendi Riono SHi, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Pengawasan cukup berperan, ini di buktikan terhadap sub indikator yaitu melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat penyimpangan di perbaiki agar tujuan tercapai. Dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Kampung Patin yaitu di sektor perikanan, rumah pakan mandiri, pasar, jasa, dan pariwisata BUMDes berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Desa dan BUMDes juga berhasil mencapai tujuan yang salah satunya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad sebagai Kepala Unit Usaha Perikanan BUMDes Kampung Patin pada hari Kamis tanggal 7 januari 2021 pukul 13.30 WIB, mengenai apa saja tindakan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap unit usaha BUMDes Kampung Patin

yang mengalami masalah, bapak Khairul Rahmad memberikan pendapatnya:

“Tindakan yang saya lakukan adalah mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi, dan berunding dengan direktur, pengawas dan komisaris”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara bapak selaku kepala unit untuk melakukan pengawasan terhadap unit usaha BUMDes agar tujuannya dapat tercapai yaitu salah satunya meningkatkan Pendapatan Asli Desa, bapak Khairul Rahmad membrikan pendapatnya:

“Peran saya selaku kepala unit adalah mengevaluasi kegiatan yang dilakukan agar nantinya jika terdapat kesalahan supaya bisa di perbaiki lagi, agar nantinya tujuan tersebut dapat tercapai yaitu pendapatan asli desa meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Khairul Rahmad Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Pengawasan cukup berperan, ini di buktikan terhadap sub indikator yaitu melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat penyimpangan di perbaiki agar tujuan tercapai. Dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Kampung Patin khususnya di Sektor Perikanan adalah salah satu unit usaha yang berpengaruh besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa karena sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian di perikanan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara *informan* dengan masyarakat Desa Koto Mesjid yaitu Ibuk Nursam pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 15.30 WIB, mengenai bagaimana cara masyarakat memberikan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan BUMDes Kampung Patin dan bagaimana padangan ibuk dengan kegiatan yang mengalami masalah, ibuk Nursam memberikan pendapatnya:

“Berdasarkan yang ibuk lihat saat ini masyarakat hanya melapor saja jika terjadi masalah kepada pihak BUMDes, namun pihak BUMDes kurang merespon laporan dari masyarakat tersebut dan pandangan ibuk terhadap kegiatan yg mengalami masalah kurang melibatkan masyarakat seperti rapat pertanggung jawabannya, ada masyarakat yang di beri undangan dalam rapat tersebut akan tetapi tidak semua masyarakat yang diberikan undangan rapat pertanggungjawaban itu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* yaitu Ibuk Nursam Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid dalam indikator Pengawasan kurang berperan, ini di buktikan terhadap sub indikator yaitu melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat penyimpangan di perbaiki agar tujuan tercapai. Pengurus dari BUMDes Kampung Patin kurang berperan dalam melibatkan masyarakatnya, begitu juga dengan laporan dari masyarakat, pengurus BUMDes kurang meresponnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid dalam indikator Pengawasan cukup berperan, ini di buktikan dari wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* terhadap sub indikator yaitu melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan jika terdapat penyimpangan di perbaiki agar tujuan tercapai.

Dari observasi yang di lakukan di lapangan peneliti menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Koto Masjid dalam melaksanakan kegiatannya khususnya di sector perikanan banyak sekali diawasi mulai dari Kepala Unit Usaha, Direktur Perikanan, Komisariss Pengawas dan tentunya masyarakat. Pengawasan sangat di perlukan oleh suatu organisasi, pengawasan ini perlu dilakukan oleh beberapa orang yang terkait dengan suatu organisasi, dengan berdirinya BUMDes di Desa maka itu tidak lepas pengawasannya oleh masyakat, guna untuk mencapai tujuannya yaitu salah satunya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

C. Hambatan Dalam Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, hambatan yang terdapat dalam penelitian Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Hambatan dalam Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah rendahnya kesadaran masyarakat Desa Koto Mesjid untuk membayar Pinjaman yang di berikan oleh BUMDes Kampung Patin, sehingga tidak ada modal lagi yang dapat di kelola oleh pengurus BUMDes Kampung Patin untuk meneruskan Simpan Pinjam.
2. Berdasarkan indicator Perencanaan, dalam menjalankan Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Penndapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang menjadi hambatan dalam indicator ini adalah tanggapan masyarakat terhadap berdirinya BUMDes Kampung Patin ada yang mendukung dan ada yang tidak

mendukung. Hasil wawancara Bersama Bapak Mustakim, S.Pd beliau menyebutkan:

“tanggapan masyarakat beragam, ada masyarakat yang mendukung dan ada pula masyarakat yang tidak mendukung. Masyarakat yang mendukung seperti yang BUMDes memberikan bantuan pakan, sehingga masyarakat yang kekurangan modal bisa terbantu dengan pemberian pakan mandiri dari BUMDes, dengan cara pembayaran diakhir panen. Jadi masyarakat tinggal memberikan makan ikannya, BUMDes yang memberikan pakannya dan BUMDes juga yang mengurus pasca panennya. Sedangkan tanggapan dari masyarakat kurang pro yaitu mereka tetap menginginkan adanya simpan pinjam sedangkan ketika BUMDes melakukan simpan pinjam maka tingkat kredit macet itu sangat tinggi”.

Salah satu pemicu terjadinya hambatan indicator perencanaan BUMDes Kampung Patin, karena anggapan dari masyarakat Desa Koto Mesjid memberikan dampak negatif untuk BUMDes Kampung Patin.

3. Berdasarkan indicator Pengorganisasian, dalam menjalankan sebuah Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang menjadi hambatan disini yaitu kurang tegasnya pihak BUMDes Kampung Patin dalam penarikan tunggakan oleh masyarakat sehingga banyak terjadi macetnya pembayaran pada unit usaha Simpan Pinjam.
4. Berdasarkan indicator Penggerak, dalam menjalankan sebuah Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang menjadi hambatan disini yaitu di bekukannya Unit Usaha Simpan Pinjam oleh pengurus atau pengelola BUMDes Kampung Patin sehingga masyarakat yang ingin membuka usaha lain tidak bisa karena tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha baru selain di sektor perikanan.

5. Berdasarkan indicator Pengawasan, dalam menjalankan sebuah Manajemen Pemerintahan pada Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, yang menjadi hambatan disini yaitu Kurangnya kemampuan Sumber Daya yang di miliki untuk mengembangkan unit usaha-usaha yang sedang berjalan, karena dari masih kurangnya inovasi setiap unit usaha yang dimiliki. Dan akibat dari pandemic *Covid-19* ini unit usaha Pariwisata belum di buka kembali oleh BUMDes Kampung Patin, sehingga tidak ada pemasukan dari unit usaha Pariwisata.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka dapat peneliti simpulkan berdasarkan teori didalam penelitian ini:

1. Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dalam indikator Perencanaan (*planning*) yaitu sebelum melakukan pembagian unit usaha, pengurus melakukan perencanaan terlebih dahulu seperti unit usaha apa yang didirikan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Koto Mesjid. Dan juga tidak lupa dengan melihat ekonomi masyarakat yang lebih dominan arahnya kemana, seperti perikanan. Dan juga BUMDes mendirikan unit usaha jasa, seperti yang di butuhkan masyarakat setempat namun tidak ada di desa, seperti BRILink (tarik tunai, dan transfer).
2. Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dalam indikator Pengorganisasian (*organizing*) yaitu Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dalam melaksanakan proses pelaksanaan kegiatannya terdapat unsur pembagian tugas kepada anggota berdasarkan SK yang di tetapkan. Dan dalam indikator

pengorganisasian ini terdapat juga fokusnya ke satu unit usaha yang memang berkembang dengan pesat untuk meningkatkan PADes.

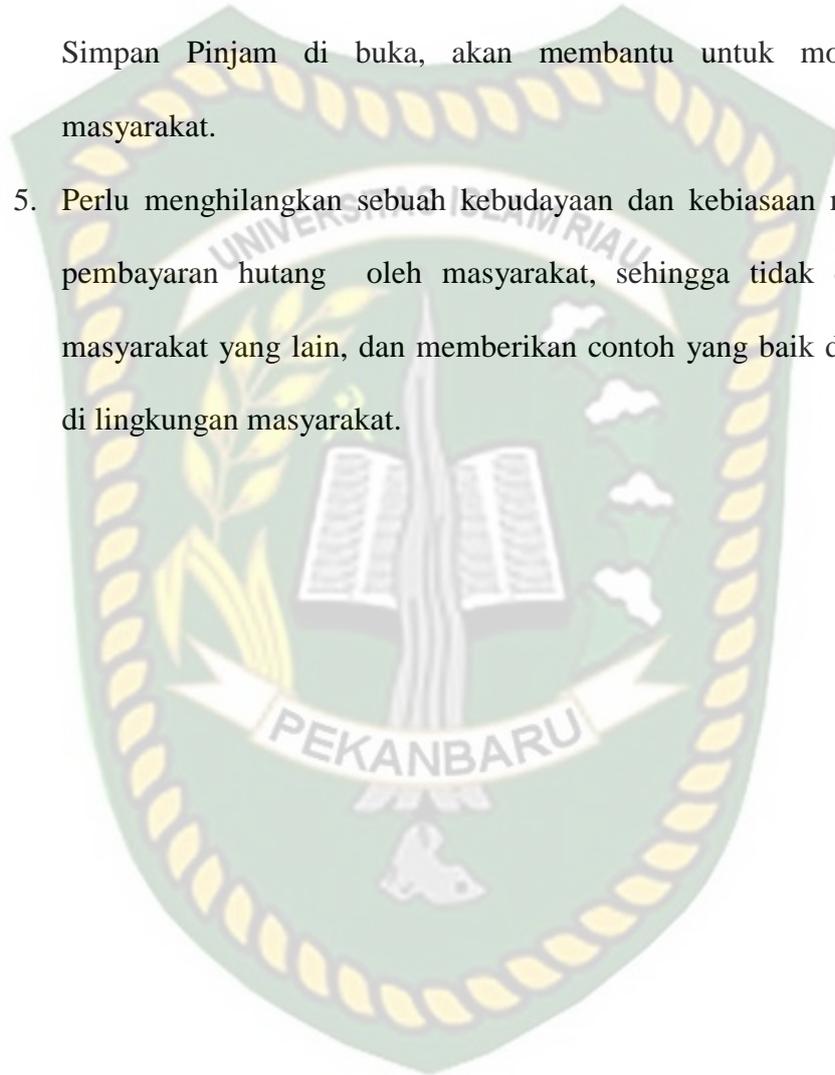
3. Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dalam indikator Penggerak (*actuating*) yaitu masih terdapat masyarakat yang mengunggak pembayaran pada unit usaha Simpan Pinjam di BUMDes Kampung Patin. Pengurus BUMDes Kampung Patin kurang tegas dalam menegur masyarakat yang menunggak pembayaran, dan juga masih adanya masyarakat yang mengeluh mengapa unit usaha Simpan Pinjam di berhentikan padahal masyarakat masih membutuhkan modal usaha.
4. Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dalam indikator Pengawasan (*controlling*) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya khususnya di sector perikanan banyak sekali diawasi mulai dari Kepala Unit Usaha, Direktur Perikanan, Komisaris Pengawas dan tentunya masyarakat. Pengawasan sangat di perlukan oleh suatu organisasi, pengawasan ini perlu dilakukan oleh beberapa orang yang terkait dengan suatu organisasi, dengan berdirinya BUMDes di Desa maka itu tidak lepas pengawasannya oleh masyarakat, guna untuk mencapai tujuannya yaitu salah satunya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya pelatihan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kabupaten untuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kabupaten juga melibatkan masyarakat tentang Unit Usaha Simpan Pinjam yang selalu menjadi permasalahan penunggakan pembayaran hutang di BUMDes Kampung Patin.
2. Perlu adanya koordinasi Pemerintah Desa dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk melakukan perencanaan kembali unit usaha Pariwisata yang tidak ada pemasukan selama Pandemi Covid-19. Agar nantinya ketika Pandemi Covid-19 berakhir, unit usaha tersebut sudah siap untuk dijalankan Kembali.
3. Perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Kampung Patin untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, misalnya di sector perikanan dengan membuat produk baru mengenai olahan ikan patin, agar nantinya lapangan pekerjaan terbuka untuk masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga dengan di bukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat juga meningkat.

4. Perlu adanya pembukaan kembali unit usaha Simpan Pinjam di BUMDes Kampung Patin, dengan menyelesaikan penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan penulis berharap jika unit usaha Simpan Pinjam di buka, akan membantu untuk modal usaha masyarakat.
5. Perlu menghilangkan sebuah kebudayaan dan kebiasaan menunggak pembayaran hutang oleh masyarakat, sehingga tidak ditiru oleh masyarakat yang lain, dan memberikan contoh yang baik dan disiplin di lingkungan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiardjo, Miriram. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Creswell, Jonh W. 2016. *Research Design: Pendeklatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hr, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Antropologi Ilmu*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2018. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sukasanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sulastri, Lilis. 2014. *Manajemen*. Bandung: La Good's Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali.
- Poerwadaminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Jakarta.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Priyono. 2007. *Buku Pengantar Manajemen*. Sidoardjo. Universitas Bina Darma.

RPDN. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

B. Jurnal

Amelia Sri Kusuma Dewi. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Amelia Sri Kusuma Dewi. 2010. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Dian Irawati dan Diana Elvianita Martanti. 2017. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Pongok Kab Blitar). Universitas Islam Balitar.

Gufnan dan Hajirin. 2019. Pelaksanaan BUMdes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di kecamatan Belo Kabupaten Bima. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima.

Helmey Willy Amanda. 2015. Strategi Pemabngunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.

Herry Suharyadi dan Mohamad Aji Insani. 2016. Manajemen

Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambah Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

- Jaryono dan Tohir. 2019. Analisis Kinerja BUMDes Mitra Usaha Makmur Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
- Nia Karniawati. 2015. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom.
- Ratna Azis Prasetyo. 2016. Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
- Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti. 2014. Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Robiyatul Adawiyah. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
- Sentosa Seimbiring. 2017. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
- Syahrhan Firdaus. 2018. Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari,

desa Pulosari, Kabupaten Pematang. Universitas Gadjah Mada.

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Koto Mesjid Nomor 141/KPTS/KM/09/2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Mesjid

Lampiran 7

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 112 Mempayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28204
Telp. +62701674674 Fax. +62701674834 Email: fupol@uisu.ac.id Website: www.uisu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI
Nomor : 1068 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	: Fidyia Nurdasana Putri
NPM	: 177310194
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Manajemen Pemerintahan Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
Persentase Plagiasi	: 23 %
Jumlah Halaman	: 111 Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status	: Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230